



# REVISI 4. RENSTRA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II

**REV.4 RENSTRA**  
**2020 - 2024**

## STASIUN KIPM MEDAN

Jl. Pelabuhan Perikanan Samudera Gabion Belawan

Call Center: (061) – 811-6012-222

Email: [stakari.belawan@kkp.go.id](mailto:stakari.belawan@kkp.go.id)

Website: <https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmmedan2>

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (RENSTRA SKIPM MEDAN II) 2020 – 2024 disusun dalam rangka menyesuaikan perkembangan kelembagaan yaitu PERPRES No. 2/ 2017 ; PERMEN KP No. 63/PERMEN-KP/2017. Selain dalam rangka menyelaraskan dengan perkembangan kelembagaan revisi Renstra ini juga dilaksanakan untuk disesuaikan dengan kebijakan penganggaran.

Penyusunannya Rencana Strategis SKIPM Medan II 2020 – 2024 Revisi 4 ini masih berlandaskan kepada kebijakan pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan visi "Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional", dengan pilar misi "Kedaulatan, Keberlanjutan dan Kesejahteraan" dan adanya revisi target indikator kinerja (IKU) tahun 2024.

Komitmen, konsistensi dan kerja keras jajaran SKIPM Medan II dan dukungan dari semua pihak baik instansi terkait ataupun pelaku usaha dalam pelaksanaan perkarantina ikan, pengendalian keamanan hayati ikan dan pengendalian mutu dan keamanan hayati ikan adalah SKIPM Medan II dalam melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan dari Hama dan Penyakit Ikan berbahaya, pengendalian keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat terlaksana sesuai yang diamanatkan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak atas masukan dan sumbangan pemikiran sehingga dokumen Rencana Strategis SKIPM Medan II 2020 – 2024 ini dapat tersusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Medan, Desember 2024

Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,  
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil  
Perikanan Medan II,



Oscar Daniel Butar Butar, S.Pi, M.Si

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatera yang mana posisi Sumatera Utara terletak pada garis 1°-4° Lintang Utara dan 98°-100° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Nanggroe Aceh Darussalam, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 km<sup>2</sup> dan luas lautan 11.000.000 km<sup>2</sup>. Luas daratan Sumut sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 206. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam 3 kelompok kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur. Wilayah timur relatif datar, bagian tengah bergelombang dan berbukit sedangkan bagian barat merupakan dataran bergelombang. Potensi perairan laut yang sangat besar tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, bila ditinjau dari kondisi agroklimatnya sangat mendukung untuk dikembangkan usaha budidaya ikan air payau. Beberapa komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain rumput laut, mutiara, kerapu, lobster. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJMN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholder kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BPPMHKP dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BPPMHKP mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (official control) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (traceability), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius., atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BPPMHKP merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia. Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BPPMHKP sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BPPMHKP dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disamping faktor internal faktor eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BPPMHKP dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BPPMHKP. Oleh karena itu faktor internal dan eksternal, potensi dan tantangan yang dihadapi BPPMHKP merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BPPMHKP tahun 2020 – 2024.

## **1.2. Kondisi Umum**

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang sebesar-besarnya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BPPMHKP menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. BPPMHKP merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan BPPMHKP juga untuk mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan

Beberapa peran SKIPM Medan II tahun 2024 dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, diantaranya:

1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Medan II Kegiatan penerapan sertifikasi CPIB pada supplier hasil perikanan dan sertifikasi produk primer yang di validasi mencapai 99,94%.
2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Medan II Kegiatan unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability, UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminana Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dan Produk yang dijamin melalui sertifikat HACCP mencapai 99,97%.
3. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya dan Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impornya mencapai 99,96%.
4. Persentase Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II kegiatan Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan mencapai 99,90%.
5. Persentase Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Sarana Pengujian Mutu, Prasarana Pengujian Mutu, Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan, Rekomendasi kebijakan parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan dan perikanan, Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu dan Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi mencapai 98,41%
6. Persentase indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan mencapai 99,91%, indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional mencapai 99,3%, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Layanan pemantauan dan evaluasi mencapai 100%, Nilai Indikator

Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Layanan Manajemen Keuangan mencapai 93,76%, Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Rekonsiliasi SIMAK BMN dan SAKPA mencapai 99,92%, Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Konsultasi/Koordinasi Keuangan mencapai 99,90%, Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor mencapai 99,97% dan Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II kegiatan Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II mencapai 100%.

7. Dukungan terhadap terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2020 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalam rangka menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, perubahan lingkungan strategis dan tuntutan publik, terutama laju arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar, serta pengendalian tumbuhan dan satwa langka.

### **1.3. Potensi dan Tantangan**

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan

kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam RPJMN 2020 - 2024 menetapkan angka target meningkatnya produksi ikan dari kegiatan budidaya menjadi 10,32 Juta ton dengan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun, serta meningkatnya produksi perikanan tangkap bernilai ekonomi tinggi menjadi 10,10 Juta ton, serta menargetkan peningkatan nilai ekspor perikanan dari USD 6,17 miliar pada tahun 2020 menjadi USD 7,85 miliar pada tahun 2024 yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen- komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik.

Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya. Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai komponen dalam fasilitasi otoritas kompeten, sertifikasi mutu, official control, BPPMHKP mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada para stakeholders. Namun terdapat juga beberapa tantangan yang harus diantisipasi, agar tidak mengganggu upaya BPPMHKP guna memenuhi target kinerja, melakukan

pengawasan, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta optimalisasi PNBP- BPPMHKP.

Beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh BPPMHKP dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan BPPMHKP dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. BPPMHKP dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Yang Meningkatkan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional Potensi BPPMHKP dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain :
  - a. Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang besar melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri;
  - b. Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan program ketertelusuran (traceability). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan dengan :
    - 1) Melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
    - 2) Memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
    - 3) Melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Vietnam; dan
    - 4) Penanganan kasus ekspor;
  - c. Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari stakeholders guna perbaikan kualitas pelayanan serta mendukung kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen the World Trade Organization (WTO) yang menciptakan sistim perdagangan bebas (free trade) melalui langkah-langkah perjanjian sanitary dan phytosanitary (SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (animal health), sementara phytosanitary merujuk pada kesehatan tumbuhan (plant health). Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.
- c. Isu tentang food safety, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (seafood fraud). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (food defense plan) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada

semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.

- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (filthy). Filthy adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar Salmonella. Salmonella adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.
  - e. Fasilitasi pemerintah untuk merangsang produktivitas usaha dan industri perikanan yang berorientasi ekspor secara langsung belum optimal. Hal ini dikarenakan belum adanya akses infrastruktur, mahalnya biaya transportasi dan logistik, dan belum adanya fasilitas layanan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) di beberapa pelabuhan di daerah sumber produksi.
  - f. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
2. BPPMHKP Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah dan Berdaya Saing Potensi BPPMHKP dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, antara lain :
- a. Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BPPMHKP bertanggung jawab untuk menjaga food safety produk perikanan nasional. Keamanan pangan (food safety) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan

agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BPPMHKP untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BPPMHKP untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
- d. Besarnya peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- e. Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- f. Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya :

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik Good Handling Practices

(GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (misuse) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (abuse).

- b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (catch certificate). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di BPPMHKP dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran dan pos lintas batas negara (PLBN), dan di SKPT yang berada di pulau terluar, antara lain :
    - a. Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan;
    - b. Peningkatan peran tugas dan fungsi wilayah kerja dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
    - c. Penguatan kerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Karantina Indonesia dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan;

- d. Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, dan impor.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, diantaranya :

- a. Luasnya cakupan wilayah pengawasan BPPMHKP dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas;
  - b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri;
  - c. Proses pemeriksaan komoditas wajib periksa karantina ikan secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak yang signifikan terhadap waktu tunggu barang di pelabuhan atau biasa dikenal dengan istilah *dwelling time*. Kondisi ini memerlukan mekanisme dan prosedur dalam proses bisnis pengawasannya dengan harapan proses penyelesaian administrasi kepabeanan (*customs clearance*) dapat dilakukan lebih cepat;
  - d. Masih adanya praktik-praktik illegal, unreported, *unregulated fishing* (IUU Fishing) dan *destructive fishing* (DF);
  - e. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan ke luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi;
  - f. Potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang-undangan dibidang karantina dan perikanan;
- 
- a. Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan

dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Potensi BPPMHKP dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya :
  - a. Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima;
  - b. Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti pengembangan sistem karantina; PPK online, dan aplikasi fishcom;
  - c. Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi;
  - d. Standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001 merupakan sistem mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi;

- e. Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian.

Tantangan yang dihadapi BPPMHKP ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya :

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BPPMHKP.

## BAB II

### VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1. Visi dan Misi

Visi SKIPM Medan II ditetapkan sesuai dengan Visi BPPMHKP dan Visi KKP 2020-2024 yaitu untuk mendukung visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BPPMHKP menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020 – 2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan;
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan;
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integrative, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BPPMHKP.

## **2.2. Sasaran Strategis**

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran strategis (SS) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan, maka BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan oleh BPPMHKP tersebut terdapat beberapa sasaran yang ingin dicapai oleh SKIPM Medan II sebagai berikut :

1. Sasaran strategis terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan indikator kinerja :
  - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan;
  - c. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI;
  - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor;
2. Sasaran strategis terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standaryang akan dicapai dalam tujuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan adalah pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, antar area, dan impor, serta pengawasan jenis ikan invasif dalam rangka mendukung fungsi BPPMHKP untuk mendukung beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan BPPMHKP sebagai berikut :
- a. Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian dan Lembaga inspeksi;
3. Sasaran strategis terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di SKIPM Medan II, dengan indikator kinerja :
- a. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan;
  - b. Indeks Profesionalitas ASN;
  - c. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP;
  - d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran;
  - e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
  - f. Persentase Penyelesaian Temuan BPK;
  - g. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja;
  - h. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa;
  - i. Tingkat Kepatuhan BMN.
- a. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup SKIPM Medan II;
  - b. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa;
  - c. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN.

### **BAB III**

#### **ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

#### **3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Yang Terkait Dengan BPPMHKP**

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BPPMHKP adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan

kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. Kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
2. Kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan;
3. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran;
4. Menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standarisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi;
5. Menambah dan meningkatkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia aparatur SKIPM Medan II termasuk penyidik pegawai negeri sipil (PPNS);
6. Meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri;
7. Menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance);
8. Mengikuti kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait pengendalian mutu hasil perikanan;
9. Berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia;

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan BPPMHKP adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan

dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran;
2. Kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan;
3. Kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa SKIPM Medan II;
4. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur berbasis elektronik termasuk peningkatan implementasi INSW;
5. Optimalisasi PNBP-SKIPM Medan II.

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BPPMHKP.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme ASN;
2. Meningkatkan sistem pengawasan internal SKIPM Medan II (SPIP-SKIPM Medan II);
3. Meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) SKIPM Medan II;
4. Meningkatkan kualitas laporan Keuangan SKIPM Medan II, serta
5. Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja SKIPM Medan II (SAKIP SKIPM Medan II).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BPPMHKP dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders-BPPMHKP. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan

kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

### **3.2 Arah Kebijakan SKIPM Medan II**

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BPPMHKP dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
2. Mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Arah kebijakan dan strategi BPPMHKP tahun 2020 – 2024 untuk mewujudkan 8 (delapan) tujuan BPPMHKP dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran

pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi SKIPM Medan II adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional;
2. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan;
3. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI;
4. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan arus barang dalam mendukung sistem logistik ikan nasional (SLIN) adalah memperlancar arus lalu lintas produk perikanan ekspor yang secara signifikan menurunkan dwelling time pada proses importasi produk perikanan dan ekspor melalui penerapan INSW dan pengembangan join inspection dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi public;
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian;

7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analis data;
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBP-BPPMHKP adalah optimalisasi sistem pengawasan PNBP berbasis digital.

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, fungsi, tujuan, serta sasaran strategis, SKIPM Medan II perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan kepada SKIPM Medan II secara efektif dan efisien. Untuk itu kegiatan pengembangan dan penataan kelembagaan yang meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak dilaksanakan secara efektif, intensif, dan berkesinambungan.

1. Kedudukan, tugas dan fungsi SKIPM Medan II:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. PER.6/PERMEN-KP/2017 tanggal 30 Januari 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BPPMHKP), SKIPM Medan II merupakan Unit Pelaksana Teknis mengemban menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Medan II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
- b. Pelaksanaan sistem jaminan mutu, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;

- c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu keamanan hasil perikanan;
  - d. Pelaksanaan administrasi BPPMHKP; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
2. Struktur organisasi SKIPM Medan II
- SKIPM Medan II merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP di bidang pelayanan operasional pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan, Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 54/Permen-Kp/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Wilayah Kerja untuk mendukung fungsi UPT induknya. Unit Pelaksana Teknis di bidang pelayanan operasional karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu, dengan mengemban fungsi:
- a) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - b) Pelaksanaan inspeksi terhadap Unit Pengolahan Ikan dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
  - c) Pelaksanaan surveilen mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - d) Pelaksanaan sertifikasi mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - e) Pelaksanaan pengujian mutu, dan keamanan hasil perikanan;
  - f) Penerapan sistem manajemen mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
  - g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
  - h) Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa
  - i) Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN

## BAB IV

### INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Tabel 4.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis BPPMHKP

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	98	-	-	-	-
	Persentase ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	98	-	-	-
	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	98	98	98
	Efektivitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	98	98
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM	%	-	-	-	-	70

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024		
	Medan II								
	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	-	-	70	
	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	-	-	70	
	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	-	-	99	
2	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	2	Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	90	-	-	-	-
			Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona	%	-	-	100	100	100
			Persentase Penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	100	100
		3	Dokumentasi mitigasi risiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Dokumen	-	-	-	1	1
		4	Persentase Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan yang di wilayah administrasi UPT Stasiun KIPM Medan II	%	70	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	68	-	-	-
	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	74	98	98
	Efektivitas pengawasan produk KP di wilayah perbatasan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	74	98
	5 Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	-	1	1
	6 Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit	%	90	-	-	-	-
	Persentase ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	77	-	-	-
	Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	100	100	100
	Persentase tindakan karantina impor yang sesuai ketentuan perkarantinaaan ikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	100	100
	7 Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi	%	90	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	90	-	-	-
	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	%	-	-	90	90	90
	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina	%	-	-	-	90	90
	8 Jumlah unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan biosecurity	Unit	29	-	-	-	-
	Sertifikasi instalasi karantina ikan pada unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menarapkan biosecurity pada lingkup Stasiun KIPM Medan II	Sertifikat	-	35	-	-	-
	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Medan II	Unit	-	-	38	35	35
	Verifikasi unit usaha perikanan yang memenuhi standard an menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Medan II	Unit	-	-	-	32	35
	9 Jumlah sertifikasi ekspor yang memenuhi standar	Sertifikat	5.77	-	-	-	-
	10 Jumlah sertifikasi kesehatan domestik yang memenuhi	Sertifikat	685	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	standar						
	11 Jumlah lokasi monitoring dan surveilen penjaminan mutu perikanan domestik	Lokasi	1	-	-	-	-
	Lokasi wilayah RI yang dijamin mutu hasil perikannya lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	3	-	-	-
	Pengawasan mutu hasil perikan domestik	Lokasi	-	-	3	3	3
	Pengawasan mutu hasil perikan domestik lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	3	3	3
	12 Pelaku usaha (UPI) yang menerapkan sistem traceability	UPI	4	-	-	-	-
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Medan II	UPI	-	10	-	-	-
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	UPI	-	-	10	10	10
	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	UPI	-	-	-	15	10
	13 Sertifikasi HACCP hasil perikanan	Sertifikat	72	-	-	-	-
	Ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi PMMT/HACCP lingkup Stasiun KIPM Medan II	Sertifikat	-	150	-	-	-
	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup pada UPI lingkup Stasiun KIPM Medan II	Produk	-	-	175	150	150

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup pada UPI lingkup Stasiun KIPM Medan II	Produk	-	-	-	175	150
14	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor	UPI	15	-	-	-	-
	Jumlah UPI yang memenuhi persyaratan ekspor lingkup Stasiun KIPM Medan II	UPI	-	35	-	-	-
	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	UPI	-	-	38	35	35
	UPI yang konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	UPI	-	-	-	42	35
15	Supplier yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik (CPIB)	Sertifikat	5	-	-	-	-
	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan	Sertifikat	-	-	10	10	10
	Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Medan II	Sertifikat	-	-	-	10	10
16	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi	Lokasi	1	-	-	-	-
	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	1	1	1
	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	-	1	1
17	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi	Lokasi	3	-	-	-	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	3	3	3
	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Medan II	Lokasi	-	-	-	3	3
	18 Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi	Parameter	2	-	-	-	-
	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi di UPT Stasiun KIPM Medan II	Parameter	-	6	-	-	-
	Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Parameter	-	-	4	2	2
3 Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	19 Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	95	-	-	-	-
	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	85	-	-	-
	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	92	95	95
	Persentase Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaan ikan,	%	-	-	-	92	95

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	mutu dan keamanan hasil perikanan diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Medan II							
	20 Nilai PNBP lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Juta Rupiah	4.403	-	-	-	-	-
	21 Nilai survey kepuasan masyarakatlayanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	84	-	-	-
	Nilai survey kepuasan masyarakatlayanan publik di UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	84	-	-
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan lingkup Stasiun KIPM Medan II	Indeks	-	-	-	-	-	3,36
	22 Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan di UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	90	-	-	-
	Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Medan II	%	-	-	-	-	70
4	Tatakelola pemerintahan yang baik	23 Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	72	-	-	-	-
		Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	%	-	73	-	-	-
		Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Indeks	-	-	83	72	72
		Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Indeks	-	-	-	84	72
		Indeks profesionalitas asn lingkup UPT Stasiun KIPM Medan II	Indeks	-	-	-	-	86

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
	24	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	A (81)	-	-	A (81)	A (81)
		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	87	-	-	-
		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	-	82
	25	Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	85	-	-	-	-
		Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	85	-	-	-
		Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	85	85	85
		Nilai rekonsiliasi kinerja Satker Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	85	85
	26	Nilai IKPA UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	Baik (88)	-	-	-	-
		Nilai IKPA UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	89	-	-	-
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	89	89	89
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	89	89
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	-	93,76
	27	Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	86	-	-	-
		Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	81	81	81
		Nilai kinerja anggaran lingkup Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	-	-	85	81
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM	Nilai	-	-	-	-	71

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Medan II						
	28 Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	1	-	-	-	-
	Jumlah inovasi pelayanan publik UPT Stasiun KIPM Medan II	Nilai	-	1	-	1	1
	29 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II	(%)	82	-	-	-	-
	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	65	-	-	-
	Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	70	82	82
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	75	75
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	-	80
	30 Unit berpredikat menuju WBK lingkup Stasiun KIPM Medan II	Unit	-	-	1	-	-
	31 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup SKIPM Medan II		-	-	≤1	-	-
	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup SKIPM Medan II		-	-	-	<0,5	-

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	-	100
	32 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	75	-	-
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	77,5	-
	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/Jasa lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	-	80
	33 Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	75	-	-
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	77,5	-
	Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun KIPM Medan II	(%)	-	-	-	-	80

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana dirinci sebagai berikut :

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan

No	Kegiatan	Anggaran					Total
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPMHKP	5.551.622	6.043.463	5.088.832	5.243.368	4.650.839	26.578.124
2	Manajemen Mutu	402.447	469.796	378.250	229.500	184.500	1.664.493
4	Pengendalian dan Pengawasan MHKP	806.875	1.077.809	749.072	1.313.304	1.283.864	5.230.925

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Revisi 4 Stasiun KIPM Medan II merupakan revisi ke empat dokumen perencanaan 5 tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis BPPMHKP serta berdasarkan Permen KP Nomor : 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan, penilaian tahapan kinerja yang telah ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya

Demikian Rencana Strategis Revisi 4 SKIPM Medan II ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
032.13.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri			1,468,364,000	
3989	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			1,283,864,000	
3989.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		15,000,000	
3989.ABR.009	Lokasi : SUMATERA UTARA				
052	Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Registrasi UPI Ke Negara Mitra dan atau Negara Tujuan Ekspor	1.0 Rekomendasi Kebijakan		15,000,000	U
A	Monitoring dan Evaluasi Nomor Registrasi Negara Mitra			15,000,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.123-Medan II )			1,000,000	PNP
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 pkt	1,000,000	1,000,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.123-Medan II )			5,900,000	PNP
	- Uang Harian Monitoring Nomor Registrasi Negara Mitra [2 Org x 6 UPI]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
	- Uang Transport Pelaksanaan Kegiatan [2 Org x 4 UPI]	8.0 OK	182,500	1,460,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.123-Medan II )			8,100,000	PNP
	- Transport Lokal Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Nomor Registrasi Negara Mitra [2 Org x 27 UPI]	54.0 OH	150,000	8,100,000	
3989.ADF	Sertifikasi Lembaga[Base Line]	5.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat		30,000,000	
3989.ADF.001	Lokasi : SUMATERA UTARA				
051	Supplier yang menerapkan Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan	5.0 Lembaga		30,000,000	U
A	Inspeksi Supplier CPIB			18,300,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.123-Medan II )			1,440,000	PNP
	- ATK	1.0 PKT	700,000	700,000	
	- Komputer Supplies	1.0 PKT	740,000	740,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.123-Medan II )			10,560,000	PNP
	> Inspeksi CPIB			5,760,000	
	- Uang Harian [2 Org x 6 UPI]	12.0 OH	370,000	4,440,000	
	- Transport [1 Org x 6 UPI]	6.0 OK	220,000	1,320,000	
	> Pengantaran Sample Sub Kontrak			4,800,000	
	- Uang Harian [1 Org x 12 UPI]	12.0 OH	150,000	1,800,000	
	- Transport [1 Org x 12 UPI]	12.0 OK	250,000	3,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

Halaman: 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II ) > Inspeksi CPIB - Transport Lokal Pelaksanaan Kegiatan Inspeksi dan Verifikasi CPIB	42.0 OH	150,000	6,300,000 6,300,000 6,300,000	PNP
B	<u>Bimtek Pelaksanaan dan Penerapan CPIB pada Pemasok Hasil Perikanan</u>			11,700,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Bimtek Pelaksanaan dan Penerapan CPIB pada Pemasok Hasil Perikanan - Tiket Medan-Jakarta PP - Uang Harian [2 Org x 3 Hari] - Hotel [2 Org x 2 Mlm] - Transport Medan-Jakarta PP [2 Org x 1 KJ]	2.0 OK 6.0 OH 4.0 OH 2.0 OK	3,210,000 430,000 500,000 350,000	11,700,000 6,420,000 2,580,000 2,000,000 700,000	PNP
3989.BIA	<u>Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]</u>	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		23,000,000	
3989.BIA.001	Lokasi : SUMATERA UTARA <u>Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya</u>	1.0 Produk		23,000,000	
052	<u>Koordinasi Penanganan kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan</u>			23,000,000	U
A	<u>Koordinasi Penanganan Kasus</u>			23,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Koordinasi/Workshop Penanganan Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan - Tiket Medan-Jakarta PP - Uang Harian [3 Org x 3 Hari] - Hotel [2 Org x 2 Mlm] - Transport Medan-Jakarta PP - Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (Sumatera Utara)	3.0 OK 9.0 OH 4.0 OH 3.0 OK 4.0 OH	3,956,000 430,000 695,500 1,000,000 370,000	23,000,000 11,868,000 3,870,000 2,782,000 3,000,000 1,480,000	PNP    SBM
3989.PDC	<u>Sertifikasi Produk[Base Line]</u>	205.0 produk, Sertifikat		80,000,000	
3989.PDC.001	Lokasi : SUMATERA UTARA <u>Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI</u>	205.0 produk		80,000,000	
051	<u>Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI</u>			80,000,000	
A	<u>Produk Yang Dijamin Melalui Sertifikasi HACCP</u>			80,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II ) - ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000 1,000,000	PNP

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) Koordinasi/Konsultasi /Inhouse Training / Temu > Teknis Terkait Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Perikanan - Tiket Medan-Surabaya PP - Uang Harian - Perjalanan Ke Jogja > Koordinasi penyusunan revisi anggaran TA 2024 - Tiket Medan -Jakarta - Hotel - Uang Harian - Transport Medan- Jakarta PP > Monitoring dan Evaluasi HACCP - Uang Harian [2 Org x 6 UPI] - Transport [2 Org x 6 UPI] > Inspeksi HACCP - Uang Harian [2 Org x 6 UPI] - Transport [2 Org x 6 UPI]			44,800,000 23,702,000 14,127,000 3,640,000 5,935,000 5,648,000 3,210,000 315,000 1,290,000 833,000 7,680,000 4,440,000 3,240,000 7,770,000 4,440,000 3,330,000	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II ) > Monitoring dan Evaluasi HACCP dan Verifikasi Hasil Perbaikan - Transport Lokal Monev HACCP [2 Org x 30 UPI] > Inspeksi dan Verifikasi HACCP - Transport Lokal Inspeksi/ Verifikasi			34,200,000 9,000,000 9,000,000 25,200,000 25,200,000	PNP
3989.PDF	<u>Sertifikasi Lembaga[Base Line]</u>		25.0 Lembaga, Badan Usaha, Sertifikat	179,000,000	
3989.PDF.002	Lokasi : SUMATERA UTARA <b>Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi</b>	25.0 Lembaga		179,000,000	
051	<b>Penerapanan Sertifikasi Produksi Primer Yang di validasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)</b>			179,000,000	U
A				6,420,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Bimtek Pelaksanaan Sertifikasi - Tiket Medan-Jakarta PP - Uang Harian - Uang Harian Fullboard - Transport Medan-Jakarta PP			6,420,000 6,420,000 4,000,000 1,060,000 360,000 1,000,000	PNP
B	<u>Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)</u>			9,420,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			9,120,000	PNP
	> Bimtek Pelaksanaan Sertifikasi			9,120,000	
	- Tiket Medan-Jakarta PP	1.0 OK	4,510,000	4,510,000	
	- Uang Harian	2.0 OH	530,000	1,060,000	
	- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon IV/Golongan III (D.K.I. JAKARTA)	3.0 OH	730,000	2,190,000	SBM
	- Uang Harian Fullboard	2.0 OH	180,000	360,000	
	- Transport Medan-Jakarta PP	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II )			300,000	PNP
	- Transport Lokal Pelaksanaan Inspeksi CPPIB	2.0 OK	150,000	300,000	
C	<i>Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB) dan Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)</i>			7,400,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			7,400,000	PNP
	> Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan			7,400,000	
	- Tiket Medan-Jakarta PP	1.0 OK	4,320,000	4,320,000	
	- Uang Harian	4.0 OH	430,000	1,720,000	
	- Uang Harian FullBoard	2.0 OH	180,000	360,000	
	- Transport Taxi Kegiatan PP	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
E	<i>Bimtek Sertifikasi Produksi Perimer</i>			5,820,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			5,820,000	PNP
	> Bimtek Pelaksanaan Sertifikasi			5,820,000	
	- Tiket Medan-Jakarta PP	1.0 OK	3,400,000	3,400,000	
	- Uang Harian	2.0 OH	530,000	1,060,000	
	- Uang Harian Fullboard	2.0 OH	180,000	360,000	
	- Transport Medan-Jakarta PP	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
F	<i>Penerapanan Sertifikasi Produksi Primer</i>			149,940,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II )			2,900,000	PNP
	> Pengelolaan PPID			2,900,000	
	- ATK	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Pencetakan leaflet/Banner	1.0 PKT	1,900,000	1,900,000	
	- Perlengkapan PPID	1.0 PKT	500,000	500,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.123-Medan II )			9,040,000	PNP
	- Cetakan Operasional Lab	1.0 pkt	9,040,000	9,040,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521821	<u>Belanja Barang Persediaan bahan baku</u> (KPPN.123-Medan II )			138,000,000	PNP
3989.QIA	- Bahan Uji Laboratorium <u>Pengawasan dan Pengendalian Produk(Base Line)</u>	1.0 pkt 3.0 Produk, Laporan, Keputusan	138,000,000	138,000,000 86,510,000	
3989.QIA.001	Lokasi : SUMATERA UTARA <b>Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya</b>	<b>3.0 Produk</b>		<b>86,510,000</b>	U
051	<b>Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik</b> <i>Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik</i>			<b>86,510,000</b> 24,838,000	
A					
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II )			13,778,000	PNP
	> Pelaksanaan Kegiatan			13,778,000	
	- ATK dan Komputer Supplies	2.0 PKT	1,069,000	2,138,000	
	- Biaya pembelian sampel produk	2.0 PKT	5,820,000	11,640,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			7,760,000	PNP
	> Inpres 01 di Kab. Deli Serdang dan Serdang Bedagai			7,760,000	
	- Uang Harian Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik	14.0 OH	370,000	5,180,000	
	- Kab. Deli Serdang dan Serdang Bedagai				
	- Transport Kegiatan Pengawasan Mutu Domestik Kab.	4.0 OK	645,000	2,580,000	
	- Deli Serdang dan Serdang Bedagai [1 Hari x 2 Keg x 2 Kab]				
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II )			3,300,000	PNP
	- Transport Lokal Perjalanan Tim Inpres 01 di Kota Medan	22.0 OK	150,000	3,300,000	
B	<i>Inhouse Training Pelaksanaan Pengawasan Mutu Domestik</i>			7,372,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			7,372,000	PNP
	- Tiket	1.0 ok	4,290,000	4,290,000	
	- Uang Harian	4.0 oh	180,000	720,000	
	- Hotel	2.0 oh	500,000	1,000,000	
	- Taksi	1.0 ok	1,362,000	1,362,000	
C	<i>Pengadaan Peralatan Mesin</i>			54,300,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.123-Medan II )			54,300,000	PNP
	- AC Split PK	1.0 PKT	54,300,000	54,300,000	
3989.QIC	<u>Pengawasan dan Pengendalian Lembaga(Base Line)</u>	70.0 Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan		118,000,000	
3989.QIC.001	Lokasi : SUMATERA UTARA <b>Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability</b>	<b>25.0 Lembaga</b>		<b>18,000,000</b>	U
052	<b>Penerapan sistem traceability di UPI</b>			<b>7,040,000</b>	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	<i>Penerapan Sistem Traceability di UPI</i>			7,040,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II )			1,000,000	PNP
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			940,000	PNP
	> Inspeksi Penerapan Sistem Traceability			940,000	
	- Uang Harian [2 Org x 1 UPI]	2.0 OH	370,000	740,000	
	- Transport	1.0 OK	200,000	200,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II )			5,100,000	PNP
	- Transport Lokal Inspeksi Penerapan Sistem Traceability	34.0 OH	150,000	5,100,000	
<b>053</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Penerapan Sistem Traceability</b>			<b>10,960,000</b>	
A	<i>Bimtek Traceability</i>			10,960,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			10,960,000	PNP
	> Bimtek Traceability			10,960,000	
	- Tiket Medan-Jakarta PP	2.0 OK	3,215,000	6,430,000	
	- Uang Harian	5.0 OH	430,000	2,150,000	
	- Transport Medan-Jakarta PP	1.0 OK	730,000	730,000	
	- Penginapan	2.0 OH	600,000	1,200,000	
	- Uang Harian Fullboard	3.0 OH	150,000	450,000	
<b>3989.QIC.002</b>	<b>UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>	<b>45.0 Lembaga</b>		<b>100,000,000</b>	
<b>051</b>	<b>UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</b>			<b>100,000,000</b>	<b>U</b>
A	<i>Surveilans Ke UPI dalam rangka Official Control</i>			68,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II )			2,145,000	PNP
	- ATK	1.0 PKT	1,145,000	1,145,000	
	- Komputer Supplies	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			19,405,000	PNP
	> Surveilans UPI Luar Kota			19,405,000	
	- Uang Harian Kegiatan Surveilance dan Verifikasi Luar Kota	39.0 OH	370,000	14,430,000	
	- Transport Kegiatan Surveilance dan Verifikasi Luar Kota	20.0 OK	248,750	4,975,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II )			46,950,000	PNP
	> Surveilance dan Verifikasi HACCP Dalam Kota			46,950,000	
	- Transport Lokal Surveilance dan Verifikasi	313.0 OH	150,000	46,950,000	
B	<i>Organoleptik</i>			31,500,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) - Transport - Uang Harian	16.0 OK 29.0 OH	238,750 370,000	14,550,000 3,820,000 10,730,000	PNP
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II ) - Transport Lokal [1 Org x 113 UPI]	113.0 OH	150,000	16,950,000	PNP
3989.RAL	<u>Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]</u> Lokasi : SUMATERA UTARA	1.0 Unit		98,842,000	
3989.RAL.001	<u>Sarana Pengujian Mutu</u>	1.0 Unit		98,842,000	
052	<u>Sarana Pengujian Mutu - pnbp</u>			98,842,000	U
A	<u>Sarana pengujian Mutu</u>			98,842,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.123-Medan II ) - Sarana pengujian Mutu	1.0 pkt	98,842,200	98,842,000	PNP
3989.RBQ	<u>Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan[Base Line]</u> Lokasi : SUMATERA UTARA	1.0 Unit		653,512,000	
3989.RBQ.001	<u>Prasarana Pengujian Mutu</u>	1.0 Unit		653,512,000	
052	<u>Prasarana Pengujian Mutu - pnbp</u>			653,512,000	U
A	<u>Prasarana pengujian Mutu</u>			559,185,000	
533121	<u>Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.123-Medan II ) - Renovasi Ruang Kerja Stasiun KIPM Medan II - Renovasi Ruang Rapat Gedung Laboratorium Stasiun KIPM Medan II - Renovasi Gedung Kantor Balai KIPM Medan I - Konsultan Pengawas Renovasi Ruang Kerja Stasiun KIPM Medan II - Konsultan Pengawas Renovasi Ruang Rapat Gedung Laboratorium Stasiun KIPM Medan II - Konsultan Pengawas Renovasi Gedung Kantor Balai KIPM Medan I	1.0 pkt 1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT 1.0 PKT	192,185,000 150,000,000 184,000,000 12,000,000 10,000,000 11,000,000	192,185,000 150,000,000 184,000,000 12,000,000 10,000,000 11,000,000	
B	<u>Pengadaan Prasarana Kantor</u>			94,327,000	
532111	<u>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.123-Medan II ) - Pengadaan Prasarana Kantor SKIPM Medan II	1.0 PKT	94,327,000	94,327,000	PNP
7010	<u>Manajemen Mutu</u>			184,500,000	
7010.DCC	<u>Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]</u> Lokasi : SUMATERA UTARA	1.0 Orang, Kegiatan		6,000,000	
7010.DCC.001	<u>Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan</u>	1.0 Kegiatan		6,000,000	
051	<u>Peningkatan kompetensi inspektur mutu</u>			6,000,000	U
A	<u>Bimbingan Teknis Bimtek pelatihan Obat Ikan untuk Inspektur Mutu</u>			6,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Bimtek Quality Assurance - Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP - Uang Harian - Transport Medan-Makasar PP			6,000,000 6,000,000 3,910,000 1,590,000 500,000	PNP
7010.PBR	<u>Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]</u>	1.0 Rekomendasi Kebijakan, Kajian		90,000,000	
7010.PBR.001	Lokasi : SUMATERA UTARA <u>Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan</u>	1.0 Rekomendasi Kebijakan		90,000,000	
051	<u>Penguatan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji</u>			90,000,000	U
A	<u>Sertifikasi Lembaga Pengujian dan Lembaga Inspeksi</u>			59,620,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II ) - Bahan Perlengkapan Kegiatan Pemeliharaan Panelis standar organoleptik produk perikanan	1.0 PKT	10,500,000	10,500,000	PNP
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.123-Medan II ) - Biaya Assesment SNI ISO/IEC 17025:2017 - Biaya Assesment ISO 17020:2012	2.0 OK 3.0 OK	3,500,000 3,500,000	7,000,000 10,500,000	PNP
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u> (KPPN.123-Medan II ) > ISO 17020:2012 - Tiket Pesawat Jakarta-Medan PP - Uang Harian - Transport Jakarta PP [2 Org x 1 Kali] - Hotel > SNI ISO/IEC 17025:2017 - Tiket Pesawat Jakarta-Medan PP - Uang Harian - Transport Jakarta PP [2 Org x 1 Kali] - Hotel	2.0 OK 5.0 OH 2.0 OH 5.0 OH 2.0 OK 5.0 OH 2.0 OH 5.0 OH	4,755,000 370,000 600,000 650,000 4,755,000 370,000 600,000 650,000	15,810,000 9,510,000 1,850,000 1,200,000 3,250,000 15,810,000 9,510,000 1,850,000 1,200,000 3,250,000	PNP
B	<u>Profisiensi, Uji Banding dan Kalibrasi Alat Laboratorium (Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan)</u>			6,000,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.123-Medan II ) - Uji Profisiensi	4.0 PKT	1,500,000	6,000,000	PNP
C	<u>Peningkatan Komunikasi dan Kinerja Pegawai</u>			24,380,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.123-Medan II ) - Paket Kegiatan Capacity Building	1.0 PKT	24,380,000	24,380,000	PNP

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7010.PDD	Standarisasi Lembaga[Base Line]	1.0 Lembaga, Unit Kerja		29,000,000	
	Lokasi : SUMATERA UTARA				
7010.PDD.001	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu	1.0 Unit Kerja		29,000,000	
051	Penerapan Standar Metode Pengujian			29,000,000	U
A	Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu			9,500,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.123-Medan II )			9,500,000	PNP
	- Tiket Pesawat PP	1.0 OK	5,920,000	5,920,000	
	- Uang Harian Full	2.0 OH	410,000	820,000	
	- Uang Harian Fullboard	2.0 OH	130,000	260,000	
	- Transport PP [1 Org x 1 Kali]	1.0 OH	500,000	500,000	
	- Hotel	2.0 OH	1,000,000	2,000,000	
B	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium			19,500,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.123-Medan II )			19,500,000	PNP
	> Kaji Ulang Dokumen dan Audit Internal			2,350,000	
	- Snack Kegiatan	50.0 OH	15,000	750,000	
	- ATK dan Komputer Supplies	2.0 PKT	800,000	1,600,000	
	> Sosialisasi Tugas dan Fungsi Serta Pelayanan Sertifikasi Lingkup BPPMHKP			17,150,000	
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	150,000	150,000	
	- Konsumsi Kegiatan [100 org x 1 hari]	100.0 OH	45,000	4,500,000	
	- Perlengkapan Peserta [100 org x 1 hari]	100.0 OH	125,000	12,500,000	
7010.QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk[Base Line]	1.0 Produk, Laporan, Keputusan		59,500,000	
	Lokasi : SUMATERA UTARA				
7010.QIA.001	Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	1.0 Produk		59,500,000	
051	Verifikasi Penerapan Standar Quality Assurance			59,500,000	U
A	Verifikasi Quality Assurance Usaha Perikanan Kelautan dan Perikanan			59,500,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.123-Medan II )			1,720,000	PNP
	- Konsumsi Peserta	30.0 OH	55,000	1,650,000	
	- ATK	1.0 Pkt	70,000	70,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			57,780,000	PNP
	> Sosialisasi dan Penerapan QA			26,940,000	
	- Tiket Pesawat Medan-Bali PP	3.0 OK	5,710,000	17,130,000	
	- Uang Harian [3 Org x 3 Hr]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Transport Medan-Makasar PP [3 Org x 1 Kali]	3.0 OH	500,000	1,500,000	
	- Hotel [3 Org x 2 Mlm]	6.0 OH	740,000	4,440,000	
	> Rakornas Quality Assurance			30,840,000	
	- Tiket Pesawat Medan-Makasar PP	3.0 OK	7,000,000	21,000,000	
	- Uang Harian [3 Org x 3 Hr]	9.0 OH	430,000	3,870,000	
	- Transport Medan-Makasar PP [3 Org x 1 Kali]	3.0 OH	500,000	1,500,000	
	- Hotel [3 Org x 2 Mlm]	6.0 OH	745,000	4,470,000	
032.13.WA	Program Dukungan Manajemen			4,650,839,000	
3987	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan			4,650,839,000	
3987.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	1.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		4,490,197,000	
-----					
3987.EBA.994	Lokasi : SUMATERA UTARA Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		4,490,197,000	U
001	Gaji dan Tunjangan			3,038,788,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,038,788,000	
511111	<u>Belanja Gaji Pokok PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			1,105,760,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	952,263,000	952,263,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	76,869,000	76,869,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	76,628,000	76,628,000	
511119	<u>Belanja Pembulatan Gaji PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			38,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	32,000	32,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,000	3,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,000	3,000	
511121	<u>Belanja Tunj. Suami/Istri PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			81,658,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	70,160,000	70,160,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	5,755,000	5,755,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	5,743,000	5,743,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

Halaman : 11

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511122	<u>Belanja Tunj. Anak PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			31,793,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	27,398,000	27,398,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,200,000	2,200,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,195,000	2,195,000	
511123	<u>Belanja Tunj. Struktural PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			6,840,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	6,120,000	6,120,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	360,000	360,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	360,000	360,000	
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			34,145,000	RM
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	29,320,000	29,320,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,160,000	2,160,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,665,000	2,665,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			6,090,000	RM
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	60,000	60,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,671,000	2,671,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,359,000	3,359,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			70,106,000	RM
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	60,400,000	60,400,000	
	- Belanja Tunj Beras (gaji ke 13)	1.0 BLN	4,853,000	4,853,000	
	- Belanja Tunj. Beras (gaji ke 14)	1.0 BLN	4,853,000	4,853,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			136,030,000	RM
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	136,030,000	136,030,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.123-Medan II )			40,210,000	RM
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	34,675,000	34,675,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,950,000	2,950,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,585,000	2,585,000	
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.123-Medan II )			98,000,000	RM
	- Belanja Uang Lembur dan Uang Makan Lembur (Gol IV, III, II)	1.0 THN	98,000,000	98,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

Halaman : 12

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	<u>Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)</u> (KPPN.123-Medan II )			1,428,118,000	RM
	- Belanja Tunjangan Kinerja	1.0 THN	1,232,340,000	1,232,340,000	
	- Belanja Tunjangan Kinerja (Tukin ke 14)	1.0 BLN	97,867,000	97,867,000	
	- Belanja Tunjangan Kinerja (Tukin ke 13)	1.0 BLN	97,911,000	97,911,000	
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>			<b>1,451,409,000</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			144,204,000	
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.123-Medan II )			143,004,000	RM
	- Pembayaran Listrik SKIPM Medan II	12.0 BLN	11,917,000	143,004,000	
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.123-Medan II )			1,200,000	RM
	- Pembayaran Telepon	12.0 BLN	100,000	1,200,000	
<b>B</b>	<u>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</u>			819,544,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.123-Medan II )			322,347,000	RM
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan PPNPN [5 OB x 1 BLN]	5.0 OB	3,000,000	15,000,000	
	- Biaya Operasional PPNPN [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	3,205,000	192,300,000	
	- Uang Lembur dan Uang Makan Lembur PPNPN	1.0 THN	9,500,000	9,500,000	
	- Biaya Paket Zoom/Call Centre	1.0 Pkt	3,000,000	3,000,000	
	- Biaya Langganan Internet	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	
	- Langganan Air Mineral/Galon	12.0 BLN	900,000	10,800,000	
	- Biaya Pajak Bumi Bangunan (PBB)	1.0 THN	6,107,000	6,107,000	
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 THN	45,640,000	45,640,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.123-Medan II )			6,069,000	RM
	- Pengiriman Surat dan Dokumen	1.0 THN	6,069,000	6,069,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.123-Medan II )			81,600,000	RM
	> Honor Pengelola Anggaran			81,600,000	
	- Honorium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12.0 OB	1,112,000	13,344,000	
	- Honorium Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,018,000	12,216,000	
	- Honorium Staf Pejabat Pembuat Komitmen [2 org x 12 bln]	24.0 OB	384,000	9,216,000	
	- Honorium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan SPM	12.0 OB	396,000	4,752,000	
	- Honorium Bendahara Pengeluaran	12.0 OB	344,000	4,128,000	
	- Honorium Staf KPA/PPABP [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	384,000	9,216,000	
	>> Honor Pengelola PNBP		0	17,328,000	
	- Honorium Atasan Langsung Bendahara Penerimaan	12.0 OB	432,000	5,184,000	
	- Honorium Bendahara Penerimaan	12.0 OB	352,000	4,224,000	
	- Honorium Pembantu Bendahara Penerimaan [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	330,000	7,920,000	
	>> Honor SAIBA/SAKPA		0	7,080,000	
	- Honorium Penanggungjawab UAKPA	12.0 OB	180,000	2,160,000	
	- Honorium Koordinator	11.0 OB	150,000	1,650,000	
	- Honorium Ketua UAKPA	12.0 OB	92,500	1,110,000	
	- Honorium Anggota UAKPA [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	90,000	2,160,000	
	>> Honor Pengurus/Penyimpan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang		0	4,320,000	
	- Honorium Pengurus/Penyimpan BMN [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	180,000	4,320,000	
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u> (KPPN.123-Medan II )			7,480,000	RM
	- Honorium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	11.0 OB	680,000	7,480,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.123-Medan II )			58,000,000	RM
	- Keperluan Sehari-hari Perkantoran	1.0 THN	40,000,000	40,000,000	
	- Keperluan sanitasi dan Rumah Tangga	1.0 THN	18,000,000	18,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

Halaman : 14

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.123-Medan II )			344,048,000	RM
	> Jasa Pemeliharaan Fiscom			10,000,000	
	- Jasa Pemeliharaan	10.0 Bln	1,000,000	10,000,000	
	> Jasa Penyedia Jasa Lainnya Perorangan			316,048,000	
	- Tunjangan Hari Raya Keagamaan Pegawai JLP [7 OB x 1 BLN]	7.0 OB	3,000,000	21,000,000	
	- Uang Lembur Pegawai JLP	1.0 THN	31,948,000	31,948,000	
	- Jasa Pegawai JLP [7 Org x 12 Bulan]	84.0 OB	3,100,000	260,400,000	
	- Seragam Dinas [6 Org x 1 Stell]	6.0 Stell	450,000	2,700,000	
	> Iuran Tahunan			18,000,000	
	- Iuran Tahunan ISO 17025 dan 17020	2.0 PKT	1,500,000	3,000,000	
	- Jasa penggantian dan pemasangan besi menara tandon air	1.0 PKT	15,000,000	15,000,000	
C	<u>Pemeliharaan/Perawatan Gedung Kantor</u>			52,840,000	
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.123-Medan II )			52,840,000	RM
	- Pemeliharaan Gedung /Bangunan Kantor	125.0 M2	217,520	27,190,000	
	- Pemeliharaan Halaman Kantor	536.0 M2	10,000	5,360,000	
	- Pemeliharaan Kanopi	1.0 Pkt	20,290,000	20,290,000	
D	<u>Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan Kantor</u>			72,048,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.123-Medan II )			72,048,000	RM
	- Pemeliharaan Mesin Fotocopy	2.0 UNIT	1,500,000	3,000,000	
	- Pemeliharaan Printer/Scanner	51.0 UNIT	120,000	6,120,000	
	- Pemeliharaan AC	30.0 UNIT	433,000	12,990,000	
	- Pemeliharaan Laptop	12.0 UNIT	500,000	6,000,000	
	- Pemeliharaan PC	32.0 UNIT	270,875	8,668,000	
	- Pemeliharaan Jaringan Internet	1.0 PKT	3,000,000	3,000,000	
	- Pemeliharaan Alat Laboratorium	1.0 PKT	13,320,000	13,320,000	
	- Pemeliharaan Inventaris Kantor	1.0 THN	10,000,000	10,000,000	
	- Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	1.0 PKT	8,950,000	8,950,000	
E	<u>Pertemuan/Jamuan Delegasi/Misi/Tamu</u>			51,226,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.123-Medan II )			51,226,000	RM
	- Pertemuan/Jamuan Tamu	1.0 THN	51,226,000	51,226,000	
F	<u>Pengadaan Pakaian Dinas</u>			27,500,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.123-Medan II )			27,500,000	RM
	- Pakaian Dinas Pegawai [23 ORG x 1 STELL]	23.0 STELL	1,000,000	23,000,000	
	- Pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti [5 ORG x 1 STELL]	5.0 STELL	900,000	4,500,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
G	<i>Operasional Genset</i>			21,350,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.123-Medan II )			21,350,000	RM
	- Operasional Bahan Bakar Genset (2 unit)	1.0 THN	11,050,000	11,050,000	
	- Pemeliharaan Genset (2 unit)	1.0 THN	10,300,000	10,300,000	
H	<i>Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Bermotor</i>			198,857,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.123-Medan II )			20,507,000	RM
	- Pembelian E Toll	1.0 PKT	12,000,000	12,000,000	
	- Perpanjangan STNK Mini Bus	1.0 UNIT	2,807,000	2,807,000	
	- Perpanjangan STNK Roda 4	2.0 UNIT	1,500,000	3,000,000	
	- Perpanjangan STNK Roda 2	9.0 UNIT	300,000	2,700,000	
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.123-Medan II )			178,350,000	RM
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	2.0 UNIT	36,820,000	73,640,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Double Gardan	1.0 UNIT	39,410,000	39,410,000	
	- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	7.0 UNIT	3,900,000	27,300,000	
	- Biaya Perbaikan Overhaul Mesin Kendaraan Roda 4	1.0 PKT	24,000,000	24,000,000	
	- Biaya Perbaikan/Pengelasan Karat dan Pengecatan Full Body Kendaraan Roda 4	1.0 PKT	14,000,000	14,000,000	
I	<i>Penambah Daya Tahan Tubuh</i>			63,840,000	
521113	<u>Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh</u> (KPPN.123-Medan II )			63,840,000	RM
	- Penambah Daya Tahan Tubuh [14 ORG x 20 HR x 12 BLN]	3360.0 OH	19,000	63,840,000	
3987.EBC	<u>Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]</u>			45,737,000	
	Lokasi : SUMATERA UTARA				
3987.EBC.954	<u>Layanan Manajemen SDM</u>	27.0 Orang		45,737,000	
052	<u>Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional</u>			45,737,000	U
A	<i>Perencanaan dan Pembangunan SDM Aparatur</i>			30,127,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II )			3,487,000	PNP
	> Monitoring Data Kehadiran Pegawai dan SKP			3,487,000	
	- ATK	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Komputer Supplies	1.0 PKT	627,000	627,000	
	- Pencetakan/Penjilidan	1.0 PKT	1,860,000	1,860,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB  
UNIT ORG  
UNIT KERJA  
ALOKASI

(032)  
(13)  
(649684)  
Rp. 6,119,203,000

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Temu Teknis Bidang Kepegawaian - Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP - Uang Harian [3 org x 3 hari] - Hotel [3 org x 2 mlm] - Taksi Medan-Jakarta PP [3 org x 1 kl]			26,640,000	PNP
				26,640,000	
		3.0 OK	5,110,000	15,330,000	
		9.0 OH	530,000	4,770,000	
		6.0 OH	600,000	3,600,000	
B	<u>Maintenance WBK</u>			3,990,000	PNP
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II ) > Pembangunan dan Maintenance ZI - ATK dan Komputer Supplies - Bahan Cetak (Banner, Stiker,dll)			3,990,000	
		1.0 PKT	990,000	990,000	
C	<u>Koordinasi Kegiatan Kerjasama</u>			11,620,000	PNP
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II ) > Coffe Morning K3/Monitoring Perkembangan Kerjasama dengan Instansi Lain - ATK dan KOMputer Supplies - Spanduk - Snack dan Konsumsi			5,680,000	
		1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
		4.0 Buah	100,000	400,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Biaya Perjalanan Koordinasi - Uang Harian [12 org x 1 kl] - Transport [12 org x 1 kl]			5,640,000	PNP
				5,640,000	
		12.0 OH	370,000	4,440,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II ) - Transport Pelaksanaan			300,000	PNP
		2.0 OK	150,000	300,000	
3987.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>			114,905,000	U
	Lokasi : SUMATERA UTARA				
3987.EBD.952	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>	1.0 Dokumen		78,000,000	
051	<u>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</u>			78,000,000	PNP
A	<u>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran</u>			25,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II ) > Penyusunan RKAKL,KAK /RAB dan Penyusunan RKT - ATK/Komputer Supplies - Penggandaan/Penjilidan			1,500,000	PNP
				1,500,000	
		1.0 PKT	500,000	500,000	
		1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

Halaman : 17

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Penyusunan/Finalisasi RKAKL			24,000,000	PNP
	- Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP	4.0 OK	2,710,000	10,840,000	
	- Uang Harian [4 org x 3 hari]	12.0 OH	430,000	5,160,000	
	- Hotel [4 org x 2 mlm]	8.0 OH	500,000	4,000,000	
	- Taksi Medan-Jakarta PP [4 org x 1 kl]	4.0 OK	1,000,000	4,000,000	
B	<i>Konsultasi/Koordinasi Keuangan</i>			25,180,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II ) - ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	500,000	500,000	PNP
	- Perlengkapan Kegiatan Capacity Building	1.0 PKT	750,000	750,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Koordinasi Keuangan dan Pelaporan			11,030,000	PNP
	- Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP	1.0 OK	5,000,000	5,000,000	
	- Uang Harian [1 org x 3 hari]	3.0 OK	430,000	1,290,000	
	- Hotel [1 org x 2 mlm]	2.0 OK	705,000	1,410,000	
	- Taksi Medan-Jakarta PP [1 org x 1 kl]	1.0 OK	1,380,000	1,380,000	
	- Uang Harian Full [4 org x 1 hari]	4.0 OK	370,000	1,480,000	
	- Penggantian Transport [2 org x 1 hari]	2.0 OK	235,000	470,000	
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.123-Medan II ) - Transport Lokal Umum dan Keuangan	86.0 OK	150,000	12,900,000	
C	<i>Rekonsiliasi Simak BMN dan SAKPA</i>			27,320,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II ) - ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	500,000	500,000	PNP
	- Penggandaan/Penjilidan	1.0 PKT	750,000	750,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II ) > Rekonsiliasi Simak BMN dan SAKPA			26,070,000	PNP
	- Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP	4.0 OK	4,000,000	16,000,000	
	- Uang Harian [2 org x 3 hari x 2 kl]	12.0 OK	315,000	3,780,000	
	- Hotel [2 org x 2 mlm x 2 kl]	8.0 OK	555,000	4,440,000	
	- Taksi Medan-Jakarta PP [2 org x 1 kl]	2.0 OK	925,000	1,850,000	
3987.EBD.953	<u>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</u>	1.0 Dokumen		4,260,000	U
051	<u>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</u>			4,260,000	
A	<i>Penyusunan Pelaporan</i>			4,260,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

Halaman : 18

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II )			4,260,000	PNP
	> Penyusunan Laporan ROK/Laporan Kinerja/Laptah/LPJ			4,260,000	
	- Penggandaan/Penjilidan	15.0 EKS	104,000	1,560,000	
	- Perlengkapan Kegiatan Capacity Building	1.0 Pkt	2,700,000	2,700,000	
<b>3987.EBD.955</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>	<b>1.0 Dokumen</b>		<b>13,572,000</b>	
<b>051</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>			<b>13,572,000</b>	U
C	<i>Penyusunan RKBMN/Penginputan Aplikasi SIRUP</i>			13,572,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II )			1,000,000	PNP
	- ATK dan Komputer Supplies	1.0 PKT	500,000	500,000	
	- Penggandaan/Penjilidan	1.0 PKT	500,000	500,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			12,572,000	PNP
	> Perdin RKBMN			12,572,000	
	- Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP	1.0 OK	2,996,000	2,996,000	
	- Uang Harian [1 org x 3 hari x 1 kl]	3.0 OK	430,000	1,290,000	
	- Hotel [1 org x 2 mlm x 1 kl]	2.0 OK	500,000	1,000,000	
	- Taksi Medan-Jakarta PP [1 org x 1 kl]	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
	>> Penginputan Aplikasi SIRUP		0	6,286,000	
	- Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP	1.0 OK	2,996,000	2,996,000	
	- Hotel [1 org x 2 mlm x 1 kl]	2.0 OK	500,000	1,000,000	
	- Uang Harian [1 org x 3 hari x 1 kl]	3.0 OK	430,000	1,290,000	
	- Taksi Medan-Jakarta PP [1 org x 1 kl]	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
<b>3987.EBD.974</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</b>	<b>1.0 Dokumen</b>		<b>19,073,000</b>	
<b>051</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</b>			<b>19,073,000</b>	U
A	<i>Pemusnahan Dokumen Persuratan dan Arsiparis</i>			17,183,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.123-Medan II )			11,463,000	PNP
	- Kotak Penyimpanan Arsip	1.0 PKT	3,700,000	3,700,000	
	- Materai	1.0 PKT	1,000,000	1,000,000	
	- Cetakan Blanko Operasional	1.0 PKT	6,763,000	6,763,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.123-Medan II )			5,720,000	PNP
	> Rakornas Kearsipan			5,720,000	
	- Tiket Pesawat Medan-Jakarta PP	1.0 OK	3,180,000	3,180,000	
	- Hotel [1 org x 2 mlm x 1 kl]	2.0 OK	500,000	1,000,000	
	- Uang Harian [1 org x 3 hari x 1 kl]	3.0 OK	180,000	540,000	
	- Taksi Medan-Jakarta PP [1 org x 1 kl]	1.0 OK	1,000,000	1,000,000	
B	<i>Kegiatan Pemusnahan Arsip</i>			1,090,000	

**RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024**

KEMEN/LEMB (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 UNIT ORG (13) Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan  
 UNIT KERJA (649684) STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN  
 ALOKASI Rp. 6,119,203,000

Halaman: 19

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.123-Medan II ) > Kegiatan Pemusnahan Arsip - Spanduk - ATK dan Penggandaan			1,090,000	PNP
		1.0 Buah	150,000	150,000	
		1.0 PKT	940,000	940,000	
				800,000	
C	<u>Honor Rohaniawan</u>			800,000	PNP
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u> (KPPN.123-Medan II ) - Honor Rohaniawan			800,000	
		1.0 PKT	800,000	800,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama  
 2. P = Komponen Penunjang  
 3. \* = Blokir

MEDAN, 16 Oktober 2024

  
**OSCAR DANIEL BUTAR BUTAR, S.PI,M.Si**  
 Penata Tingkat I 198107152008011009

STRUKTUR ORGANISASI STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MEDAN II TAHUN 2024

